



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Gajah Mada No. 103 Praya-Lombok Tengah

LAPORAN SEMESTER 1



TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Gajah Mada No. 103 Praya-Lombok Tengah

Praya, 27 Juli 2021

Kepada

Yth. Kepala BPKAD Kabupaten
Lombok Tengah

di,

Praya

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 045.2/132/DISPERKIM.SEK/2020

NO	JENIS SURAT / BARANG	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Catatan Atas Laporan Keuangan Semester I (CALK) Tahun 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah	1 (satu) Gabung	Dikirim dengan hormat untuk menjadi maklum. Terima kasih

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas
Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lombok Tengah

Ir. LALU RAHADIAN, M.Si.
NIP. 196712311992031117

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Semester I Tahun 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dan bebas salah saji yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Praya, 27 Juli 2021

Kepala Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lombok Tengah,



Ir. LALU RAHADIAN, M.Si.

NIP. 19620231992031117

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya Laporan Keuangan Berbasis Aktual **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman** Kabupaten Lombok Tengah Semester I Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan.

Perwujudan pemerintah yang baik (*Good Government*) merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi.dalam kondisi yang sangat cepat berubah (*Turbulance*) hal yang harus tetap dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah menjaga kepercayaan melalui unjuk kerja sebagaimana yang telah diamanatkan oleh seluruh lapisan masyarakat melalui penyediaan *public good service* hal yang dirasakan sangat dinantikan adalah bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan secara tranparan dan akuntabilitas dalam karangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Diharapkan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2021 **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman** Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh *stakeholde* tentang pencapaian kinerja program-program serta kegiatan- kegiatan yang telah dilaksanakan oleh **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman** Kabupaten Lombok Tengah.

Demikian akhirnya kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu penyusunan ini kami sampaikan terima kasih.

Praya 27 Juli 2021

Kepala Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lombok Tengah



Ir.LALURAHADIAN,M.Si
NIP.196712301992031117

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB. I	PENDAHULUAN.....	1
1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	1
1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.3	Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	3
BAB. II	Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	4
2.1	Kebijakan Keuangan.....	4
2.2	Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	5
BAB. III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	8
3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	8
3.2	Hambatan dan Kendala Pencapaian Target.....	8
BAB. IV	Kebijakan Akuntansi.....	9
4.1	Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan.....	9
4.2	Basis Akuntansi Yang Mendasar Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	9
4.3	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	9
4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah	10
A.	Laporan Realisasi Anggaran.....	10
I.	Pendapatan.....	10
II.	Belanja.....	10
B.	Neraca.....	11
I.	Aset Lancar.....	11
II.	Aset Tetap.....	12
III.	Aset lainnya.....	14
IV.	Kewajiban Jangka Pendek.....	14
V.	Ekuitas.....	14

BAB. V	Penjelasan Pos – Pos Pelaporan Keuangan.....	15
5.1	Rincian dan Penjelasan Masing – Masing Pos – Pos Pelaporan Keuangan.....	15
5.1.1	Pendapatan.....	15
5.1.2	Belanja.....	15
	Penjelasan POS-POS Laporan Operasional.....	20
	Neraca Komparatif per 30 Juni 2021 dan 2020.....	22
BAB VI	Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan.....	24
6.1	Informasi Umum.....	24
6.2	Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok.....	24
6.3	Ketentuan Perundang – Undangan Yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional.....	25

LAMPIRAN

1. Pernyataan Pengantar
2. Pernyataan Tanggung Jawab
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4. Laporan Operasional
5. Neraca
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. CALK
8. Berita Acara Pemeriksaan Stok Opname Material Barang Pakai Habis
9. Surat Tanda Setoran (STS)



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 JUNI 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

No		ANGGARAN	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1		3	4	5	6
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1	Pendapatan Pajak Daerah				
2	Pendapatan Retribusi Daerah	99,120,000.00	8,260,000	8.33	-
3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	4,680,876.00	100.00	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	99,120,000.00	12,940,876.00	13.06	-
	JUMLAH PENDAPATAN	99,120,000.00	12,940,876.00	13.06	-
		32,856,173,671.00	6,920,730,121.00	21.06	13,438,371,475.00
	BELANJA OPERASI	25,925,102,541.00	4,933,023,160.00	19.03	13,438,371,475.00
1	Belanja Pegawai	4,924,123,109.00	2,556,688,214.00	51.92	2,189,852,783.00
2	Belanja Barang dan Jasa	20,400,979,432.00	1,776,334,946.00	8.71	11,248,518,692.00
3	Belanja Bantuan Sosial	600,000,000.00	600,000,000.00	-	
	BELANJA MODAL	6,931,071,130.00	1,987,706,961.00	28.68	
1	Belanja Tanah	6,919,492,980.00	1,987,706,961.00	28.73	
2	Belanja Peralatan dan Mesin	11,578,150.00		-	
3	Belanja Bangunan dan Gedung			-	
4	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan			-	
5	Belanja Aset Tetap Lainnya			-	
	Jumlah Belanja Modal	6,931,071,130.00	1,987,706,961.00	28.68	
	JUMLAH BELANJA	32,856,173,671.00	6,920,730,121.00	21.06	
		(32,757,053,671.00)	(6,907,789,245.00)	21.09	(13,438,371,475.00)

Praya, 30 Juni 2020

Kepala perumahan dan kawasan pemukiman
Kab. Lombok TengahIr. LALU RAHADIAN M.Si
NIP. 196712311982931117



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
SKPD DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
PER 30 JUNI 2021 DAN 2020**

NO	URAIAN	LO 2021	LO 2020
	PENDAPATAN OPERASIONAL		
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1	Pendapatan Pajak Daerah		
2	Pendapatan Retribusi Daerah	8,260,000.00	-
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	-	-
4	Lain - lain PAD Yang Sah	4,680,876.00	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	12,940,876.00	-
	LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
1	Pendapatan Hibah -LO		-
	Jumlah Lain - Lain Pendapatan Yang Sah		-
	JUMLAH PENDAPATAN	12,940,876.00	-
	BEBAN		
1	Beban Pegawai	2,556,688,214.00	1,986,177,783
2	Beban Barang dan Jasa	1,739,945,256.00	10,156,430,353
3	Beban Bunga	-	-
4	Beban Subsidi	-	-
5	Beban Hibah	-	1,332,790,300
6	Beban Bantuan Sosial	600,000,000.00	-
7	Beban Penyisihan Piutang	-	-
8	Beban Lain-lain	-	-
9	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-
10	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-
11	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-
12	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
13	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-
14	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-
15	Beban Bagi Hasil	-	-
16	Beban Bantuan Keuangan	-	-
	Jumlah Beban	4,896,633,470.00	13,475,398,436
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL	(4,883,692,594.00)	(13,475,398,436)
	SURPLUS NON OPERASIONAL		-
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO		
2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		
3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		
	DEFISIT NON OPERASIONAL		-
1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO		
2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		
3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,883,692,594.00)	(13,475,398,436.00)
	POS LUAR BIASA		
1	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO		-
2	BEBAN LUAR BIASA		-
	JUMLAH POS LUAR BIASA		-
	SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,883,692,594.00)	(13,475,398,436)

Praya, 30 Juni 2021
Kepala perumahan dan kawasan pemukiman
Kab. Lombok Tengah





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NERACA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
PER 30 Juni 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020
	ASET		
	ASET LANCAR		
	Kas dan Setara Kas	3,582,700,393.00	-
1	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	3,582,700,393.00	-
3	Kas di BLUD	-	-
4	Setara Kas	-	-
5	Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	-	-
6	Kas di Bendahara BOS	-	-
7	Kas lainnya	-	-
	Piutang Pendapatan	-	-
1	Piutang Pajak Daerah	-	-
2	Piutang Retribusi Daerah	-	-
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di pisahkan	-	-
4	Piutang Lain-lain PAD	-	-
5	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
6	Penyisihan Piutang Pendapatan	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
1	Uang Muka Pekerjaan	-	-
2	Piutang Lain-lain Lainnya	-	-
3	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Beban Dibayar Dimuka	-	-
	Persediaan	30,024,318.00	2,073,656
	JUMLAH ASET LANCAR	3,612,724,711.00	2,073,656.00
	ASET TETAP		
1	Tanah	29,854,758,558.00	27,867,051,597
2	Peralatan dan Mesin	6,943,700,445.71	6,943,700,446
3	Gedung dan Bangunan	14,625,456,438.00	14,625,456,438
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	25,960,401,739.50	25,960,401,740
5	Aset Tetap Lainnya	126,950,000.00	126,950,000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
7	Akumulasi Penyusutan	(9,535,569,555.00)	(9,535,569,555)
	JUMLAH ASET TETAP	67,975,697,626.21	65,987,990,665
	ASET LAINNYA		
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
1	Akum Penyusutan Kemitraan dg Pihak III		
	Aset Tidak Berwujud		
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		
	Aset Lain-lain	91,979,000.00	91,979,000
1	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	91,979,000.00	91,979,000
	JUMLAH ASET	71,680,401,337.21	66,082,043,321
	KEWAJIBAN		
	Kewajiban Jangka Pendek		
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
2	Utang Bunga	-	-
3	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
4	Utang Belanja	-	8,439,028
5	Utang Transfer	-	-
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	8,439,028
	JUMLAH KEWAJIBAN	-	8,439,028
	EKUITAS		
1	EKUITAS	71,680,401,337.21	66,073,604,293
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	71,680,401,337.21	66,082,043,321.21

Praya, 30 Juni 2021

Kepala perumahan dan kawasan pemukiman
Kab. Lombok TengahI. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992901117



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
PER 30 Juni 2021 dan 2020

NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS AWAL	66,073,604,293	59,177,380,201.00
2	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	(4,883,692,594)	(63,053,135,197.00)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	-	(538,452,463)
	Koreksi Nilai Kas	-	-
	Koreksi Nilai Piutang	-	-
	Koreksi Nilai Beban Dibayar Dimuka	-	-
	Koreksi Nilai Persediaan	-	-
	Koreksi Nilai Investasi	-	-
	Koreksi Nilai Aset Tetap	-	-
	Koreksi Nilai Aset Lainnya	-	-
	Koreksi Nilai Kewajiban	-	-
	R/K PPKD	10,490,489,638	70,487,811,752.00
4	EKUITAS AKHIR	71,680,401,337.21	66,073,604,293.00

Praya, 30 Juni 2021

Kepala perumahan dan kawasan pemukiman
 Kab. Lombok Tengah



Ir. LALU RAHMAN, M.Si

NIP. 196712311992931117

Bab I

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terdiri atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya.

Sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 33 Tahun 2004 dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan ketentuan pada peraturan-peraturan tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) semester setelah tahun anggaran berakhir.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17/2003, UU No. 33/2004, PP No 58/2005, PP No. 24/2005, PP No. 08/2006 dan Peraturan Daerah No. 5/2007. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sesuai PSAP - PP 71 Tahun 2010 terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas (d) Neraca; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan.

Tujuan pelaporan keuangan ini adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas publik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atas sumber daya yang dipercayakan kepada SKPD, dengan:

- a) Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana;
- b) Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- c) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

- d) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Dinas/Badan/Kantor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah selaku entitas akuntansi.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 4578);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 5165);
- 9) dst.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, LO, LPE, dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja keuangan

- 2.1. Kebijakan keuangan
- 2.2. Indikator pencapaian target kinerja keuangan

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala pencapaian target

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas pelaporan keuangan SKPD
- 4.2. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.5. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos Pendapatan
- 5.2. Penjelasan Pos Belanja
- 5.3. Penjelasan Pos Aset
- 5.4. Penjelasan Pos Kewajiban
- 5.5. Penjelasan Pos Ekuitas dana
- 5.6. Pengungkapan Informasi sehubungan dengan penerapan basis akrual

Bab II
Kebijakan Keuangan dan Pencapaian
Target Kinerja Keuangan

2.1. Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 disahkan melalui Perda APBD Nomor: 3 Tahun 2020 tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Terkait dengan perubahan anggaran pendapatan dan belanja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah, sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Sebelum	Anggaran Setelah	Kenaikan/ Penurunan	%
I	Pendapatan				
1	Hasil Retribusi Daerah	99,120,000.00	99,120,000.00	-	-
2	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	99,120,000.00	99,120,000.00	-	-
II	Belanja				
	Belanja Operasi	26,481,105,340.00	25,925,102,541.00	(556,002,799.00)	(2.10)
1	Belanja Pegawai	5,229,418,208.00	4,924,123,109.00	(305,295,099.00)	(5.84)
2	Belanja Barang dan Jasa	19,131,687,132.00	20,400,979,432.00	1,269,292,300.00	6.63
3	Belanja Bantuan Sosial	2,120,000,000.00	600,000,000.00	(1,520,000,000.00)	(71.70)
	Belanja Modal	7,856,578,150.00	6,931,071,130.00	(925,507,020.00)	(11.78)
1	Belanja Modal Tanah	7,845,000,000.00	6,919,492,980.00	(925,507,020.00)	(11.80)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11,578,150.00	11,578,150.00	-	-
	Jumlah Belanja	34,337,683,490.00	32,856,173,671.00	(1,481,509,819.00)	(4.31)
	Defisit/Surplus	(34,238,563,490.00)	(32,757,053,671.00)	(1,481,509,819.00)	4.33

Menyikapi kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan adanya perubahan APBD tahun 2021 tersebut diatas, beberapa strategi yang ditempuh oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman antara lain:

- 1) Upaya peningkatan pendapatan yang menjadi leading sector Dinas Kabupaten Lombok Tengah, telah melakukan kebijakan antara lain:
 - a. Penambahan Alat
 - b. Melakukan Sosialisasi ke Kecamatan, Desa/Kelurahan, Kepala Kampung/Lingkungan
 - c. Menetapkan dan menugaskan retribusi jasa usaha rusunawa dibekali dengan surat tugas dan tanda bukti pembayaran retribusi sampah.
 - d. Melakukan koordinasi lebih intensif kepada para penghuni/penyewa rusunawa.

2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran **Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dalam konteks penganggaran berdasar Permendagri Nomor: 90 tahun 2019** pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

- 1) **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

Tujuan Program ini untuk mengurangi dampak lingkungan yang tercemar oleh air limbah. Untuk Mencapai Tujuan tersebut di dukung dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.55.164.000,00 terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%, Sedangkan Jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp.53.045.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0%.
- 2) **Program Pengembangan Permukiman**

Tujuan program ini meningkatkan kawasan permukiman, Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.15.375.039.096,00 terealisasi sebesar Rp.671.381.000,00 atau 4,37,% sedangkan setelah perubahan sebesar Rp.15.356.174.096,00 terealisasi sebesar Rp. 675.203.500,00 atau 4,40%.
- 3) **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Tujuan program ini untuk meningkatkan persetasni Terarah dan Terukurnya Capaian Kinerja, Keuangan, Pelayan Admnistrasi. Koordinasi SKPD . Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.5.988.586.292,00 terealisasi sebesar Rp.1.494.157.023,00 atau 26,56,% sedangkan setelah perubahan sebesar Rp.5.625.918.793,00 terealisasi sebesar Rp.2.747.396.577,00 atau 45,88%.
- 4) **Program Pengembangan Perumahan**

Tujuan program ini meningkatnya Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani serta Rusunawa tersedia dan terkelola dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.276.808.885,00 terealisasi sebesar Rp.48.792.733,00 atau 17,63,% sedangkan setelah perubahan sebesar Rp.270.088.485,00 terealisasi sebesar Rp. 77.937.233,00 atau 28,86%.
- 5) **Program Kawasan Permukiman**

Tujuan program ini untuk meningkatkan perkembangan pecegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.238.345.000,00 terealisasi sebesar Rp.116.214.250,00 atau 53,67,% sedangkan setelah perubahan sebesar Rp.216.535.000,00 terealisasi sebesar Rp.143.264.250,00 atau 60,11%
- 6) **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**

Tujuan program ini untuk meningkatkan penanganan RTLH di Kabupaten Lombok Tengah. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.2.265.877420,00 terealisasi sebesar Rp.27.555.000,00 atau 1,23% sedangkan setelah perubahan sebesar Rp. 2.245.592.220,00 terealisasi sebesar Rp.90.221.000,00 atau 3,98%.
- 7) **Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)**

Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas PSU yang ada di Kabupaten Lombok Tengah agar terjaga dalam kondisi baik. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.1.241.956.825,00 terealisasi sebesar Rp.278.504.000,00 atau 22,42% sedangkan setelah perubahan sebesar Rp.1.201.756.125,00 terealisasi sebesar Rp.471.985.600,00 atau 39,27%.

8) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Tujuan program ini untuk penanganan ganti rugi tanah untuk fasilitas public tersedia. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.8.628.345.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.641.181.961,00 atau 22,42% sedangkan setelah perubahan sebesar Rp.7.625.982.980,00 terealisasi sebesar Rp.2.664.096.961,00 atau 39,72%.

9) Program Pengelolaan Tanah Kosong

Tujuan program ini untuk pengelolaan pemanfaatann tanah kosong untuk kawasan baru terbangun. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.159.380.972,00 terealisasi sebesar Rp.1.525.000,00 atau 0,96% sedangkan setelah perubahan sebesar Rp.156.380.972,00 terealisasi sebesar Rp.49.250.000,00 atau 31,49%.

10) Program Pengelolaan Tanah Kosong

Tujuan program ini untuk pengelolaan penataan penggunaan tanah agar terarahnya penyelenggaraan pengembangan kawasan. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.108.180.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.375.000,00 atau 1,27% sedangkan setelah perubahan sebesar Rp.104.740.000,00 terealisasi sebesar Rp.4.040.000,00 atau 1,31%.

Ditinjau dari konteks PP 71 Tahun 2012 terkait penyajian laporan keuangan sesuai SAP, target dan realisasi keuangan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	% dari Anggaran
I	Pendapatan				
1	Hasil Retribusi Daerah	99,120,000.00	99,120,000.00	8,260,000.00	8.33
2	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	4,680,876.00	100
	Jumlah Pendapatan	99,120,000.00	99,120,000.00	12,940,876.00	13.06
II	Belanja				
	Belanja Operasi	26,481,105,340.00	25,925,102,541.00	4,933,023,160.00	18.63
1	Belanja Pegawai	5,229,418,208.00	4,924,123,109.00	2,556,688,214.00	48.89
2	Belanja Barang dan Jasa	19,131,687,132.00	20,400,979,432.00	1,776,334,946.00	9.28
3	Belanja Bantuan Sosial	2,120,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	28.30
	Belanja Modal	7,856,578,150.00	6,931,071,130.00	1,987,706,961.00	25.30
1	Belanja Modal Tanah	7,845,000,000.00	6,919,492,980.00	1,987,706,961.00	25.34
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11,578,150.00	11,578,150.00	-	-
	Jumlah Belanja	34,337,683,490.00	32,856,173,671.00	6,920,730,121.00	20.15

Realisasi Anggaran Pendapatan sampai dengan semester 1 telah terealisasi sebesar Rp.6.920.730.121,00 atau 21,15 % disebabkan karena

- a. Untuk retribusi Rusunawa mulai di lakukan pada bulan Maret dan ada beberapa tempat yang belum terisi serta ada beberapa penghuni yang tidak mau membayar.
- b. Ada tambahan untuk Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Sebesar Rp.4.680.876,00.

Realisasi Anggaran belanja sampai dengan semester 1 telah terealisasi sebesar Rp.6.920.730.121,00 atau 21,06 % disebabkan karena :

- a. Pokir-Pokir yang terdapat pada Program Pengembangan Permukiman baru mulai terealisasi pada awal Juni 2021 sebesar Rp.15.356.174.096,00 terealisasi sebesar Rp.731.486.000,00 atau 4,76%.
- b. Terdapat perbedaan jumlah realisasi anggaran dan spj bendahara pengeluaran di belanja modal, dikarenakan ada beberapa SPJ yang belum di SP2D kan.

Bab III
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi anggaran tahun 2021 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2020.

No	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020		
		Anggaran Semula	Realisasi Anggaran	% dari Anggaran	Anggaran Semula	Realisasi Anggaran	% dari Anggaran
I	Pendapatan						
1	Hasil Retribusi Daerah	99,120,000.00	8,260,000.00	8.33	99,120,000.00	-	-
2	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	4,680,876.00	100	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	99,120,000.00	12,940,876.00	13.06	99,120,000.00	-	-
II	Belanja						
	Belanja Operasi	26,481,105,340.00	4,933,023,160.00	18.63	65,902,682,686.00	13,438,371,475.00	20.39
1	Belanja Pegawai	5,229,418,208.00	2,556,688,214.00	48.89	4,237,868,686.00	2,189,852,783.00	51.67
2	Belanja Barang dan Jasa	19,131,687,132.00	1,776,334,946.00	9.28	61,664,814,000.00	11,248,518,692.00	18.24
3	Belanja Bantuan Sosial	2,120,000,000.00	600,000,000.00	28.30	-	-	-
	Belanja Modal	7,856,578,150.00	1,987,706,961.00	25.30	8,682,770,000.00	2,100,000.00	0.02
1	Belanja Modal Tanah	7,845,000,000.00	1,987,706,961.00	25.34	-	-	-
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11,578,150.00	-	-	7,375,870,000.00	2,100,000.00	0.03
3	Belanja Bangunan dan Gedung					-	-
4	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan				1,306,900,000.00	3,600,000.00	0.28
5	Belanja Aset Tetap Lainnya						-
	Jumlah Belanja	34,337,683,490.00	6,920,730,121.00	20.15	74,585,452,686.00	13,440,471,475.00	18.02

3.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

- a. Untuk retribusi Rusunawa mulai di lakukan pada bulan Maret dan ada beberapa tempat yang belum terisi serta ada beberapa penghuni yang tidak mau membayar.
- b. Pokir-Pokir yang terdapat pada Program Pengembangan Permukiman baru mulai terealisasi pada awal Juni 2021 sebesar Rp.15.356.174.096,00 terealisasi sebesar Rp.731.486.000,00 atau 4,76%.
- c. Terdapat perbedaan jumlah realisasi anggaran dan spj bendahara pengeluaran di belanja modal, dikarenakan ada beberapa SPJ yang belum di SP2D kan.

Bab IV

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan Keuangan Daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2021 juga telah mengalami perubahan.

4.1. Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Asumsi kemandirian entitas;
berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan.
- b. Asumsi kesinambungan entitas;
berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untuk melakukan likuidansi
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).
Berarti bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yang diberlakukan untuk setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

- **Basis Kas (cash basis) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran**
Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas di Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas di Kas Daerah.
- **Basis AkruaI (accrual basis) untuk penyusunan Neraca**
Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan **nilai perolehan historis** dan dalam **mata uang rupiah**. Transaksi yang menggunakan **mata uang asing dikonversikan** terlebih dahulu dengan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, penerapan SAP dalam Laporan keuangan pemerintah diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2006. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain: Pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca, Laporan dan Realisasi Anggaran.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Semester tahun 2020 adalah sebagai berikut:

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. Pendapatan

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi pendapatan antara lain:

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah.
- b. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah.
- c. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.
- e. Pengembalian / koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang pendapatan. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan terjadi setelah periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar (SILPA).
- f. Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

II. Belanja

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan belanja daerah yaitu:

- a. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah.
- b. Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan. Apabila belanja diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.
- c. Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- d. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil – transfer. Belanja Operasi diklasifikasikan atas : belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal diklasifikasikan atas : belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

B. NERACA**I. ASET LANCAR**

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar antara lain: Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya, dan Persediaan.

I.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

I.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

I.3. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

I.4. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

I.5. Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

I.6. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 6 (Enam) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

II. ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 6 (Enam) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

II.1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

II.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 6 (Enam) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

II.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

II.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan.

Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

II.5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan hewan/tanaman. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

II.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

II.7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis aset tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan.

III. ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain.

III.1. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

III.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan sebesar nilai perolehannya. Terhadap Aset lain-lain tidak dilakukan penyusutan.

IV. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

IV.1. Uang Muka dari BUD

Uang Muka dari BUD merupakan utang yang timbul akibat SKPD belum menyetor kepada Kas Daerah atas sisa UYHD per tanggal neraca. Perkiraan ini dicatat sejumlah nilai nominal yang belum disetor ke kasda.

IV.2 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

V. EKUITAS

Ekuitas adalah Kekayaan bersih PEMDA yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Bab V
Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

5.1.1 PENDAPATAN

Jumlah pendapatan dalam tahun 2021 dengan target anggaran sebelum perubahan setelah perubahan sebesar Rp.99.120.000,00 terealisasi sebesar Rp.12.940.876,00 atau 13,6%. Terdiri dari Retribusi Daerah yaitu Retribusi Jasa Usaha (Biaya Sewa Rusunawa) senilai Rp.8.260.000,00 dan Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah senilai Rp.4.680.876,00.

Rincian atas jumlah pendapatan tersebut adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Sebelum	Realisasi	
			Rp	%
1	Pendapatan	99,120,000.00	8,260,000.00	8.33
2	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah		4,680,876.00	100
Jumlah Pendapatan		99,120,000.00	12,940,876.00	13.06

5.1.2 BELANJA

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai dari kelompok belanja langsung dan belanja tidak langsung, dan belanja barang/jasa dari kelompok belanja langsung. Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan belanja jalan, jaringan dan jaringan aset tetap.

Jumlah Belanja dalam Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran sebelum sebesar Rp.34.337.683.490,00 realisasinya sebesar Rp.6.920.730.121,00 atau 21,15%. Rincian atas jumlah belanja tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Sebelum	Realisasi	
			Nilai (Rp)	%
	Belanja Operasi	26,481,105,340.00	4,933,023,160.00	18.63
1	Belanja Pegawai	5,229,418,208.00	2,556,688,214.00	48.89
2	Belanja Barang dan Jasa	19,131,687,132.00	1,776,334,946.00	9.28
3	Belanja Bantuan Sosial	2,120,000,000.00	600,000,000.00	28.30
	Belanja Modal	7,856,578,150.00	1,987,706,961.00	25.30
1	Belanja Modal Tanah	7,845,000,000.00	1,987,706,961.00	25.34
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11,578,150.00	-	0.00
JUMLAH BELANJA		34,337,683,490.00	6,920,730,121.00	20.15

Gambaran angka realisasi Belanja Daerah secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. **Belanja Operasi**, target anggaran sebelum sebesar Rp.26.481.105.340,00. terealisasi sebesar Rp.4.933.023.160,00 atau 18,63%. Rincian atas jumlah Belanja Operasi tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Sebelum	Realisasi	
			Nilai (Rp)	%
	Belanja Operasi	26,481,105,340.00	4,933,023,160.00	18.63
1	Belanja Pegawai	5,229,418,208.00	2,556,688,214.00	48.89
2	Belanja Barang dan Jasa	19,131,687,132.00	1,776,334,946.00	9.28
3	Belanja Bantuan Sosial	2,120,000,000.00	600,000,000.00	28.30

2. **Belanja Modal**, target anggaran sebesar Rp.7.856.578.150,00 terealisasi sebesar Rp.1.987.706.961,00 atau 25,30%. Rincian atas jumlah Belanja Modal tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Sebelum	Realisasi	
			Nilai (Rp)	%
	Belanja Modal	7,856,578,150.00	1,987,706,961.00	25.30
1	Belanja Modal Tanah	7,845,000,000.00	1,987,706,961.00	25.34
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11,578,150.00	-	0.00

1. Belanja Operasi

Gambaran angka realisasi Belanja Operasi secara terperinci adalah sebagai berikut:

1.1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan target anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 5.229.208.208,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp.2.556.688.214,00, atau 46,89%. Angka anggaran dan realisasi atas belanja pegawai tersebut merupakan reklasifikasi dari belanja pegawai penganggaran tahun 2021 yang berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006. Permendagri No. 59/2007, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Sebelum	Realisasi	
			Nilai (Rp)	%
	Belanja Pegawai	5,229,418,208.00	2,556,688,214.00	48.89
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3,489,128,208.00	1,932,787,186.00	55.39
1	Belanja Gaji Pokok PNS	2,710,836,520.00	1,519,101,420.00	56.04
2	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	297,925,097.00	155,278,716.00	52.12
3	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	173,716,200.00	85,440,000.00	49.18
4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	112,098,000.00	65,755,000.00	58.66
5	Belanja Tunjangan Beras PNS	192,353,314.00	103,922,700.00	54.03
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2,164,905.00	3,267,216.00	150.92
6	Belanja Pembulatan Gaji PNS	34,172.00	22,134.00	64.77
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1,666,454,000.00	610,125,028.00	36.61
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1,666,454,000.00	610,125,028.00	36.61
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	73,836,000.00	13,776,000.00	18.66
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	4,956,000.00		0.00
2	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	68,880,000.00	13,776,000.00	20.00

1.2) Belanja Barang

Belanja barang dengan target anggaran semula sebesar Rp. 19.131.687.132,00 , realisasi pengeluaran sebesar Rp. 1.776.334.946,00 atau 9,28%. Angka anggaran dan realisasi atas belanja barang tersebut merupakan reklasifikasi dari belanja barang & jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan penganggaran tahun 2021 yang berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 jo. Permendagri No. 59/2007, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Sebelum	Realisasi	
			Nilai (Rp)	%
	Belanja Barang dan Jasa	19,131,687,132.00	1,776,334,946.00	9.28
	Belanja Barang	16,571,912,346.00	1,022,199,849.00	6.17
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	459,889,849.00	1,533,533.00	0.33
2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	422,662,000.00	139,323,100.00	32.96
3	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	12,950,000.00	-	0.00
4	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	18,400,000.00	9,200,000.00	50.00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	136,838,159.00	82,890,000.00	60.58
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	10,500,000.00	6,660,000.00	63.43
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	19,250,000.00	4,375,000.00	22.73
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	13,768,277.00	8,117,052.00	58.95
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	18,993,446.00	10,925,521.00	57.52
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	36,134,643.00	1,259,643.00	3.49
11	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15,253,000,972.00	714,641,000.00	4.69
12	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	169,525,000.00	43,275,000.00	25.53
	Belanja Jasa	2,238,071,400.00	721,075,097.00	32.22
1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	25,200,000.00	12,600,000.00	50.00
2	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	818,880,000.00	343,440,000.00	41.94
3	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	167,600,000.00	69,000,000.00	41.17
4	Belanja Jasa Tenaga Ahli	653,739,000.00	143,000,000.00	21.87
5	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	8,250,000.00	4,564,000.00	55.32
6	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	6,000,000.00	4,000,000.00	66.67
7	Belanja Tagihan Air	58,800,000.00	5,149,900.00	8.76
8	Belanja Tagihan Listrik	78,632,400.00	20,569,792.00	26.16
9	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3,420,000.00	1,425,000.00	41.67
10	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	41,400,000.00	15,038,750.00	36.33
11	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	21,150,000.00	2,539,655.00	12.01
12	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	355,000,000.00	99,748,000.00	28.10
	Belanja Pemeliharaan	193,211,386.00	29,260,000.00	15.14
1	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	45,000,000.00	21,270,000.00	47.27
3	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10,980,000.00	5,490,000.00	50.00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	134,731,386.00	-	0.00
	Belana Perjalanan Dinas	128,492,000.00	3,800,000.00	2.96
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	114,892,000.00	-	0.00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,600,000.00	3,800,000.00	27.94

1.3) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dengan target anggaran semula sebesar Rp. 2.120.000.000,00 , realisasi pengeluaran sebesar Rp. 600.000.000,00 atau 9,28%. Angka anggaran dan realisasi atas belanja barang tersebut merupakan reklasifikasi dari belanja bantuan sosial berupa rumah relokasi untuk warga yang terkena dampak pembangunan Sirkuit Mandalika Sebanyak 120 keluarga.

No	Uraian	Anggaran Sebelum	Realisasi	
			Nilai (Rp)	%
	Belanja Bantuan Sosial	2,120,000,000.00	600,000,000.00	28.30
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2,120,000,000.00	600,000,000.00	28.30

2. Belanja Modal

Gambaran angka realisasi Belanja Modal secara terperinci adalah sebagai berikut:

2.1) Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.7.845.000.000,00, realisasi pengeluaran sebesar Rp.1.987.706.961,00 atau 25,34%. Realisasi tersebut merupakan dari realisasi belanja modal tanah. Angka anggaran dan realisasi atas belanja dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Sebelum	Realisasi	
			Nilai (Rp)	%
	Belanja Modal Tanah	7,845,000,000.00	1,987,706,961.00	25.34
1	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	800,000,000.00	-	0.00
2	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1,645,000,000.00	1,389,966,961.00	84.50
3	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Instalasi	5,400,000,000.00	597,740,000.00	11.07

Adapun rincian Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja :

No	Uraian	Nominal
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1,389,966,961.00
1	Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah SD Tonjer Tahap II, An. Sabahudin	179,240,900.00
2	Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah SMP N 15 Pujut Tahap II An. Sabahudin	750,000,000.00
3	Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah SMP N 15 Pujut Tahap II An. Moh. Nurdin	356,312,700.00
4	Pembayaran Belanja Pengadaan Tanah Untuk Puskesmas Batujangkih An. Sarjan	104,413,361.00

Adapun rincian Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja :

No	Uraian	Nominal
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Instansi	597,740,000.00
1	Pembayaran PengadaanTanah Untuk SPAM di Penggat dan Untuk Boster SPAM di Tanak Awu Kec. Pujut Seluas 1.452 m ² An. Baiq Nurhalimah, SPd	597,740,000.00

2.2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.11.578.150,00, realisasi pengeluaran sebesar Rp. 0,00 atau 0,0%. Realisasi tersebut merupakan 0,46% dari realisasi belanja modal secara keseluruhan. Angka anggaran dan realisasi atas belanja modal peralatan dan mesin tersebut merupakan reklasifikasi belanja modal bangunan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Sebelum	Realisasi	
			Nilai (Rp)	%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11,578,150.00	-	0.00
1	Belanja Modal Alat Pembersih	3,700,000.00	-	0.00
2	Belanja Modal Alat Pendingin	878,150.00	-	0.00
3	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	7,000,000.00	-	0.00

PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**1. PENDAPATAN-LO**

Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah per 30 Juni tahun 2021 sebesar Rp. 12.940.876,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	LO
1	Retribusi Daerah	8,260,000.00
2	Lain-lain PAD yang Sah	4,680,876.00
Jumlah		12,940,876.00

Rincian Pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Retribusi Daerah

Saldo Retribusi Daerah - LO pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah per 30 Juni tahun 2021 senilai Rp.8.260.000,00. yang terdiri atas:

No	Uraian	LO
	Retribusi Daerah	8,260,000.00
1	Retribusi Jasa Usaha	4,680,876.00

b. Lain-Lain PAD yang Sah

Saldo Lain-lain PAD yang Sah - LO pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah per 30 Juni tahun 2021 senilai Rp.4.680.876,00. yang terdiri atas:

No	Uraian	LO
	Lain-lain PAD yang Sah	4,680,876.00
1	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	4,680,876.00

2. BEBAN

Saldo Beban - LO pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah per 30 Juni tahun 2021 sebesar Rp. 4.896.633.470,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	LO
	Belanja Operasi	
1	Belanja Pegawai	2,556,688,214.00
2	Belanja Barang dan Jasa	1,739,945,256.00
3	Belanja Bantuan Sosial	600,000,000.00
Jumlah		4,896,633,470.00

Rincian Beban tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 senilai Rp.2.556.688.215,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	LO
	Beban Pegawai	
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1,932,787,186.00
2	Beban Penghasilan ASN	610,125,028.00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13,776,000.00
	Jumlah	2,556,688,214.00

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 senilai Rp.1.739.945.256,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	LO
	Beban Pegawai	
1	Beban Barang	985,810,159.00
2	Beban jasa	721,075,097.00
3	Beban Pemeliharaan	29,260,000.00
4	Beban Perjalanan Dinas	3,800,000.00
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-
	Jumlah	1,739,945,256.00

Terdapat Selisi LRA dengan LO di karenakan masih terdapat Persediaan senilai Rp.2.073.656,00 dan utang senilai Rp.8.439.028,00 di akhir tahun,serta terdapat sisa persediaan per 30 Juni 2021 Senilai Rp.30.024.318,00 rincian sebagai berikut :

No	Uraian	LO
	Beban barang	
1	Barang Habis Pakai	1,022,199,849.00
2	Sisa Tahun Lalu	2,073,656.00
3	Utang Tahun Lalu	(8,439,028.00)
4	Sisa Sampai Dengan Per 30 Juni 2021	(30,024,318.00)
	Jumlah	985,810,159.00

c. Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan Sosial per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 senilai Rp.600.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	LO
	Beban Bantuan Sosial	
1	Beban Bantuan Sosial Kepada Keluarga	600,000,000.00
	Jumlah	600,000,000.00

NERACA KOMPARATIF per 30 Juni 2021 dan 2020**1. ASET****a) Aset Lancar**

Aset Lancar per 30 Juni 2021 terdiri dari:

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 3.852.700.393,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Saldo	Saldo
1.	Sisa UUDP/UYHD	3.852.700.393,00
2.	Pajak Pusat yang belum disetor ke Kas Negara	0
Jumlah		3.852.700.393,00

Sisa Kas UP/GU Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Telah disetor Ke Kas daerah Per Tanggal 30 Juni 2021

Sisa saldo kas di Bendahara Pengeluaran terlalu Besar di karenakan Terdapat Berberapa SPJ yang masih belum di SP2D kan Oleh Bagian Keuangan Daerah.

2) Persediaan

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 masing-masing sebesar Rp.30.024.318,00 dan Rp. 2.073.656,00 Nilai persediaan ini ditentukan berdasarkan stock opname yang dilaksanakan oleh pengurus barang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Persediaan*	Saldo 2021 (Rp.)	Saldo 2020 (Rp.)
1.	Peralatan Kebersihan	0	0
2.	ATK	30.024.318,00	2.073.656,00
3.	Pengadaan Alat Bantu	0	0
4.	Alat Bantu Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	0	0
Jumlah		30.024.318,00	2.073.656,00

b) Aset Tetap

Saldo Aset tetap per 30 Juni 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp.71.279.115.519,21 dan Rp. 65.987.990.665,21 Nilai Aset Tetap merupakan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari:

No	Uraian	Saldo per 30-06- 2020 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2019 (Rp)
1.	Tanah	29.854.758.558,00	27.867.051.597,00
2.	Peralatan dan Mesin	6.943.700.445,71	6.943.700.445,71
3.	Gedung dan Bangunan	14.625.456.438,00	14.625.456.438,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jembatan	25.960.401.739,50	25.960.401.739,50
5.	Aset Tetap Lainnya	126.950.000,00	126.950.000,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
7.	Akumulasi Penyusutan	(96.532.997.027,00)	(96.532.997.027,00)
Jumlah		67.975.697.626,21	65.987.990.665,21

c) Aset Lainnya

Saldo Aset tetap per 30 Juni 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp.91.979.000,00 dan Rp. 91.979.000,00 Nilai Aset Tetap merupakan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari:

No	Uraian	Saldo per 30 Juni 2021(Rp)	Saldo per 31 desember 2020(Rp)
1.	Tagihan Jangka Panjang	0	0
2.	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0
3.	Aset Tidak Berwujud	0	0
4.	Aset Lain-lain	91.979.000,00	91.979.000,00
5.	Akumulas Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0
6.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0
Jumlah		91.979.000,00	91.979.000,00

Bab VI

Penjelasan atas Informasi - Informasi Non Keuangan

6.1. Informasi Umum

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sejak tahun 2020 dipimpin oleh **Ir. Lalu Rahadian, M.Si** sesuai dengan SK Bupati Lombok Tengah Nomor: 1 Tahun 2020. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman ini terdiri dari 4 Bidang, dengan struktur organisasi terlampir.

Untuk pelaksanaan visi, misi dan tugas pokok dan fungsi Dinas/Badan/Kantor ini telah didukung dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana sebagaimana terlampir.

6.2. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Sifat operasi dan kegiatan pokok Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, terkait dengan pelaksanaan visi dan misi.

- a. Penyusunan rencana dan program serta melaksanakan kebijaksanaan dalam membantu Bupati dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- b. Pengelolaan tata usaha dinas yang meliputi administrasi umum, keuangan perlengkapan dan kepegawaian
- c. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pekerjaan umum sesuai yang ditetapkan Bupati
- e. Pelaksanaan koordinasi yang meliputi segala usaha kegiatan untuk menyelenggarakan hubungan kedalam dan keluar
- f. Pengelolaan unit pelaksanaan teknis (UPT)
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

6.3. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan & pelayanan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor: 108 Tahun 2000 tentang Tata cara pertanggung jawaban kepala Daerah yang merupakan keterangan sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah yang berkaitan dengan dugaan atas perbuatan pidana Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah yang oleh DPRD dinilai dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik yang luas.
- 2) Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dapat dipanggil oleh DPRD atau dengan inisiatif sendiri untuk memberikan keterangan atas dugaan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- 3) Pemanggilan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari seluruh anggota.

Demikian Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Praya, 27 Juli 2021

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



IP. KALU RAHADIAN, M.Si

NIP. 196712311992031117



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jln. Gajah Mada No. 103 Telp. (0370)

Praya 83511

BERITA ACARA PEMERIKSAAN STOCK OPNAME BARANG PAKAI HABIS ALAT TULIS KANTOR (ATK)

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lombok Tengah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007, kami melakukan pemeriksaan terhadap persediaan barang pakai habis pakai semester I per tanggal 31 Juni kepada :

Nama Lengkap : SABRON JAMIL, A.Md.
Jabatan : Penyimpan Barang pada Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Lombok Tengah

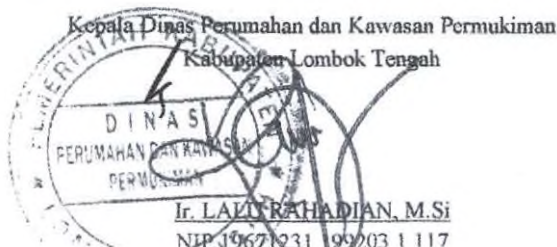
Berdasarkan hasil pemeriksaan barang serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Amplop	10	box	25,774	257,740
2	Bantal Stampel / stampel pad	5	buah	12,887	64,435
3	Binder Klip	20	kotak	25,130	502,600
4	Bolpoint	2	lusin	46,393	92,786
5	Bolpoint	2	lusin	270,627	541,254
6	Bolpoint	15	buah	64,435	966,525
7	Bok Arsip	15	buah	28,996	434,940
8	Buku Agenda isi 100 lbr	2	buah	17,380	34,760
9	Buku Ekspedisi isi 50 lbr	2	buah	11,715	23,430
10	Cutter	10	buah	22,552	225,520
11	Isi pisau Cutter	10	buah	20,000	200,000
12	Isi staples kecil	5	kotak	6,930	34,650
13	Isi staples sedang	5	kotak	14,300	71,500
14	Karet penghapus	10	buah	2,530	25,300
15	Kertas	25	lembar	9,665	241,625
16	Kertas HVS	110	rim	57,992	6,379,120
17	Kertas HVS	115	rim	57,992	6,669,080
18	Kertas HVS	100	rim	57,992	5,799,200
19	Klip	10	kotak	6,444	64,440
20	Map	50	buah	28,351	1,417,550
21	Map	55	buah	2,577	141,735
22	Map	25	pak	32,218	805,450
23	Map	75	buah	32,218	2,416,350
24	Map	100	buah	11,598	1,159,800
25	Paper Klip	12	pcs	6,444	77,328
26	Pelubang kertas	5	buah	45,105	225,525
27	Penggaris	7	buah	9,665	67,655
28	Penghapus / Korektor	5	buah	7,732	38,660
29	Pensil	20	buah	4,000	80,000
30	Spidol	20	buah	9,021	180,420
31	Spidol	20	buah	7,732	154,640
32	Staples Kecil	5	buah	16,500	82,500
33	Staples sedang	10	buah	54,780	547,800
Jumlah Total					30,024,318

Terbilang : Tiga puluh juta dua puluh empat ribu tiga ratus delapan belas ribu rupiah,-

Demikian Berita Acara ini dibuat, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lombok Tengah



Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP.19671231 199203 1 117

Penyimpan Barang



SABRON JAMIL, A.Md.
NIP.19601120 202012 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

t003100018 003 t0031 10/03/2021

003 0032100706000 201 IDR 2,000,000 K

003 003001010401002360 IDR 2,000,000 D

KAS DAERAH RKUD KABUPATEN LOMBOK TENGAH perk
im-gaji dan tunjangan 10/03/2021 14:10:29

ST/Na

/ST/ST/

(2021)

W/

PT. LAMP. NTD

No. rekening: 003 21 00706 00 3

jumlah anggaran yang dibayar Rp. 2.000.000,00

(bilang) rupiah Dua juta rupiah

Dengan ini saya beritahukan sebagai berikut: Pengambilan kasankabupaten kabupaten Lombok Tengah dan bawah Bank Mandiri
No. 1000

No	Kode Rekening	Uraian Rekening objek	Jumlah (Rp)
1	003 003 21 007 06 000	Gaji dan Tunjangan	2.000.000,00
		Jumlah	2.000.000,00

Mengotahui

sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lombok Tengah



10 MAR 2021

KCP



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

003.0032100706000.201 IDR 2,080,000 K
003.0032100706000.201 IDR 2,080,000 D
KAS DAERAH RKUD KABUPATEN LOMBOK TENGAH /STS
-RUSUNAWA/DISPERKIM/2021 25/03/2021 08:54:58

STS No : /STS-RUSUNAWA/DISPERKIM/2021

Bank : PT. BANK NTB
No. Rekening : 003.21.00706.00-0

Harap diterima uang sebesar : **Rp. 2.080.000,-**
(dengan huruf) : *Dua Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut : Uang sewa kamar Rusunawa

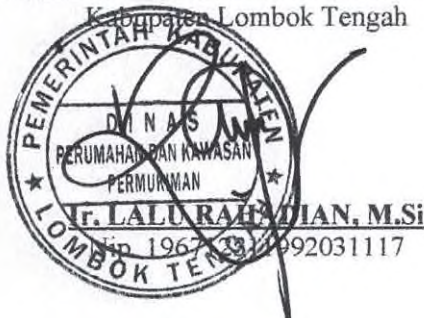
No	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
1	4.10.02.02.01.0001	Lt.2 An. Zainal Abidin Ridwan darf Januari-Maret	390.000
2	4.10.02.02.01.0001	Lt.3 An. Busairi dari Januari-Maret	360.000
3	4.10.02.02.01.0001	Lt.4 An. Rita Kristina dari Januari-Maret	330.000
4	4.10.02.02.01.0001	Lt.5 An. Rosita Afriani dari Januari-Maret	300.000
5	4.10.02.02.01.0001	Lt.5 An. Ernawati dari Januari-Maret	300.000
6	4.10.02.02.01.0001	Lt.5 An. Meliana dari Januari-Maret	300.000
7	4.10.02.02.01.0001	Lt.5 An. Eliana Andriani untuk bulan Maret	100.000
JUMLAH			2.080.000

Uang tersebut diterima pada tanggal,



Mengetahui:

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lombok Tengah



Bendahara
Penerimaan

EDY JUMHARYONO, SE
Nip. 197810272010011002



5012200006 003 50122 25/05/2021
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KAS SURAT TANDA SETOR
No. 03/STS-RUSUNAWA/DISPERKIM/2021 25/05/2021
1 08:46:19 (STS)

STS No : 03 /STS-RUSUNAWA/DISPERKIM/2021

Bank : PT. BANK NTB
No. Rekening : 003.21.00706.00-0

Harap diterima uang sebesar : **Rp. 3.330.000,-**
(dengan huruf) : *Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut : Uang sewa kamar Rusunawa

No	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
I	4.10.02.02.01.0001	A.n. Wira Purwata, SS,MA, dkk	3.330.000
JUMLAH			3.330.000

Uang tersebut diterima pada tanggal, Mei 2021

Mengetahui:
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lombok Tengah

25 MAY 2021

Ir. LALU RATADIAN, M.Si
Nip. 196712311992031117

Bendahara
Penerimaan

EDY JUMHARYONO, SE
Nip. 197810272010011002

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

003 0032100706000 201 IDR 2,680,876 K
 003 003001010401004 (STS) IDR 2,680,876 D
 KAS DAERAH RKUD KABUPATEN LOMBOK TENGAH STS

STS No. **0A**

STS-GJ/DISPERKIM/2021

Bank : **PT. BANK NTB**

No. Rekening : **003.21.00706.00-0**

Harap diterima uang sebesar **Rp. 2.680.876,00**

(dengan huruf)

Dua juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut: Pengembalian sisa kekurangan keterlambatan pembayaran Tunjangan anak dan beras s.r. Baitq Anis Nurillah

No	Kode Rekening	Uraian Rincian obyek	JUMLAH (Rp)
1.	5.1.1.1	Gaji dan Tunjangan	2.680.876,00
JUMLAH			2.680.876,00

Mengetahui
 Kepala Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Kabupaten Lombok Tengah

27 MAY 2021



Bendahara

EDY JUMHARYONO, SE.
 NIP. 197610272919911992



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SURAT TANDA SETOR

(STS) IDR 910.000 K
No. 05/000-DISPERKIMAWA/DISPERKIM/2021 08/06/2021
1 08.57.03

STS No : 05 /STS-RUSUNAWA/DISPERKIM/2021

Bank : PT. BANK NTB
No. Rekening : 003.21.00706.00-0

Harap diterima uang sebesar : **Rp. 910.000,-**
(dengan huruf) : Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut : Uang sewa kamar Rusunawa

No	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
1	4.10.02.02.01.0001	A.n. Haji Zulkarnain, dkk	910.000
JUMLAH			910.000


Uang tersebut diterima pada tanggal, Mei 2021

08 JUN 2021

Mengetahui:
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lombok Tengah


M. LULU RAHADIAN, M.Si
Nip. 196713311992031117

Bendahara
Penerimaan


EDY JUMHARYONO, SE
Nip. 197810272010011002



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

t012200044 003- t0122 15/06/2021
003 0031007060001 201 21R 1,940,000 K
003 003001010401004060 IDR 1,940,000 D
KAS DAERAH RKUD KABUPATEN LOMBOK TENGAH STS
NO : 06/STS-RUSUNAWA/DISPERKIM/2021 15/06/20
21 11:05:45

STS No : 06 /STS-RUSUNAWA/DISPERKIM/2021

Bank : PT. BANK NTB
No. Rekening : 003.21.00706.00-0

Harap diterima uang sebesar : **Rp. 1.940.000,-**
(dengan huruf) : *Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah*

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut : Uang Sewa Kamar Rusunawa

No	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
1	4.10.02.02.01.0001	A.n. Sri Mayantini, dkk	1.940.000
JUMLAH			1.940.000

Uang tersebut diterima pada tanggal:

Mengetahui:
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lombok Tengah



Dr. LALURAHADIAN, M.Si
Nip. 196712311992031117

Bendahara
Penerimaan

EDY JUMHARYONO, SE
Nip. 197810272010011002